

KAJIAN BIROKRASI DARI ASPEK HISTORIS DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Oleh: **Lalu Muh. Danial**

Fakultas Politik Pemerintahan IPDN Kampus NTB

Pos-el: lalumhdanial1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha menggali nilai-nilai historis yang masih relevan dalam era globalisasi dan era otonomi daerah menuju pencapaian visi dan misi bersama, yaitu masyarakat adil dan makmur. Kajian birokrasi dari aspek historis berdimensi: politik, sosial, ekonomi dan pembangunan sebagai cerminan dalam menapak kedepan meraih cita-cita berbangsa dan bernegara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah ditinjau dari aspek historisnya dan untuk mengetahui penyebab jatuh banggunya suatu pemerintahan dalam periode tertentu. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif serta melakukan pendekatan-pendekatan secara historis dan normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa Pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah merupakan kelanjutan dari pemerintahan lokal dimasa lampau, dengan konsep-konsep modern dan mengalami pasang surut dengan masuknya dominasi dan penaklukan oleh bangsa dan kelompok lainnya. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan serta timbulnya berbagai intrik yang berkembang menjadi suatu fitnah apabila tidak disikapi dengan bijaksana akan membawa kehancuran bersama. Nilai-nilai persatuan, kesatuan dan pluralism yang perlu diaktualisasikan serta ketahanan lokal menuju ketahanan nasional perlu diperkuat. Peran birokrasi sebagai agen pemersatu dan dan agen pembangunan, pembaharuan untuk menyejahterakan rakyat sangat menentukan dalam sepanjang sejarah. Peran tersebut tidak boleh diabaikan, karena akan menyebabkan timbulnya perlawanan rakyat dan memberi peluang kepada pihak luar untuk campur tangan serta mengambil keuntungan dari kondisi tersebut.

Kata kunci: birokrasi, pemerintah daerah, historis

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, kondisi yang hiterogin disatu sisi merupakan modal dasar pembangunan dan dapat dijadikan sebagai pemicu dan modal dalam meraih cita-cita bersama, yaitu “masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir bathin”

Di pihak lain kondisi yang *hiterogin* tersebut dapat menjadi bahaya laten apabila dikelola kurang bijaksana dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan dan wawasan mengenai kondisi sosial budaya di masa lampau diperlukan sebagai acuan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sistem

sosial budaya dan perkembangan budaya birokrasi dimasa lampau diperkirakan ada perlu diaktualisasikan dan disesuaikan dengan kondisi kekinian. Menarik untuk diteliti terkait sejarah pemerintahan (birokrasi) di Lombok Tengah, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimana perkembangan birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah ditinjau dari aspek historisnya? Apakah yang menyebabkan jatuh banggunya suatu pemerintahan dalam periode tertentu?

Pengalaman-pengalaman masa lampau dapat dipergunakan dalam mengelola birokrasi yang sudah jauh berubah orientasinya, dari dilayani kearah melayani. Perubahan orientasi diperlukan dalam menghadapi persaingan global dan era keterbukaan. Menghadapi persaingan global dan era keterbukaan, peranan birokrasi sebagai agen pembaharu dan pembangunan semakin menduduki posisi strategis. Hasan Efendi dalam Jurnal Transformasi Pemerintahan menyatakan, bahwa:

Birokrasi merupakan mesin daya saing yang kuat dalam memutar turbin dan jalannya roda pemerintahan. Bila birokrasi diibaratkan sebagai mesin, maka birokrat merupakan subjek yang berjalan mengendalikan suatu organisasi pemerintahan yang berjalan seiring dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam konteks kerajaan, birokrasi lebih menekankan pada birokrasi tradisional, yaitu hubungan antara antara raja dengan rakyat yang merupakan hubungan antara *gusti* dengan *kawula*. Pihak *gusti* (raja) memberikan perlindungan atau pengayoman, sedangkan pihak

kawula memberikan pelayanan dan penghormatan. (Hasan Efendi; 2009; 52).

Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa paradigma pemerintahan sebagai mesin penggerak membawa rakyatnya (penumpang) ke tujuan yang dictacitakan bersama dan hubungan antara birokrasi dengan rakyat sudah berubah. Rakyat tidak lagi menjadi pelayan, tetapi justru yang harus “dilayani”. Lebih lanjut Hasan Efendi menerangkan adanya hubungan yang bersifat khirarkhis antara *patron-client*. Yang bersifat simetris antara raja (penguasa) dengan rakyat. Raja merupakan pusat otoritas dan sumber otoritas, sumber hukum, serta pengambil kebijakan dalam berbagai bentuk keputusan. Struktur organisasi birokrasi tradisional merupakan struktur yang sangat kuat hierarki antara kelas penguasaan dengan jajarannya, yaitu raja beserta keluarganya an para birokratnya. Pribadi raja adalah sebagai pemilik kekuasaan di seluruh kerajaan, tercermin dalam struktur administrasi sesuai dengan sistem politik patrimonial. Pada masa penjajahan, di daerah-daerah yang dikuasai Belanda pemerintahan dilaksanakan dengan sistem “*Indirect Rule*”. Tujuannya agar dapat memanfaatkan struktur (birokrasi tradisional) secara efektif guna mempertahankan pengaruhnya dan dapat menggali sumber daya alam dan mempertahankan hegemoninya. Keuntungan bagi penguasa lokal adalah dapat mempertahankan otoritas tradisionalnya. Sistem pemerintahan “*Indirect Rule*” melahirkan dua bentuk lembaga pemerintahan, yaitu: Pemerintahan Pribumi (*Inheemsch* –

Bestuur) yang dipimpin oleh raja dan Pemerintahan Sipil Belanda (*Nederlandsch-Bestuur*). Sistem pengangkatan dalam pemerintahan tradisional sudah mulai ada campur tangan pihak Belanda dalam sistem Pemerintahan Pribumi dengan pemberian *besluit* (Surat Keputusan), orang-orang yang dipandang pantas menduduki jabatan selalu berorientasi pada strata sosial (keturunan bangsawan). Pengangkatan Pegawai pada masa birokrasi Belanda (*Nederlandsch-Bestuur*) tidak berdasarkan keturunan, tetapi ditentukan oleh faktor pendidikan dan *profesionalisme* (Gde Putra Agung: 2009:4), namun tidak sepenuhnya dapat diterapkan.

Birokrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan suatu organisasi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Pada masa birokrasi tradisional atau masa kerajaan di Nusantara, pendekatan penyelenggaraan birokrasi berorientasi kepada perlindungan raja dan penghormatan dan pelayanan *kawula*. Sejalan dengan perubahan dan kemajuan terutama di Eropa dengan munculnya revolusi Industri, orientasi organisasi birokrasi juga mengalami perubahan. Weber dalam Robbins yang dikutip oleh Hasan Efendi (Hasan Efendi 2009: 53). menjelaskan bahwa;

bureaucracy an organizational form characterized by division of labour, a well-defined authority hierarchy, high formalization, impersonality, employment decision based of merit, career track to employees and distinct separation of members organizational and personal lives.

Kuitipan tersebut mengisyaratkan bahwa birokrasi modern ditandai oleh:

adanya pembagian kerja, adanya hierarki, formalitas yang tinggi dan perbedaan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif serta melakukan pendekatan-pendekatan secara historis dan normatif. Data yang diperlukan mencakup data primer dan data sekunder yang digali melalui metode studi kepustakaan dan dokumen, observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), diskusi dengan pihak-pihak terkait. Sumber data/informasi adalah: Naskah Kuno, Literatur, Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan serta *best practices* yang relevan.

Wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan mereka yang pernah berkecimpung di Birokrasi pada masa lampau di Lombok Tengah yang mengetahui informasi penyelenggaraan pemerintahan dimasa lampau. Analisis data kualitatif dikenal ada model alir; dan model interaktif. Model alir, yang menjadi perhatian adalah pengorganisasian waktu, penusunan proposal penelitian, pengumpulan data dan analisis data, sedangkan model interaktif reduksi data dan penyajian data memerhatikan hasil data yang dikumpulkan, kemudian proses penarikan simpulan dan verifikasi. Lokasi Penelitian adalah di Kabupaten Lombok Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu dari 10 Kabupaten/Kota di NTBt, berada di antara 116 05'-

116 Bujur Timur dan 8. Luas wilayahnya 1.208,39 km² (120.839 ha). Berdasarkan Sensus tahun 1971, penduduk Kab.Loteng sebanyak 476.486 jiwa. Sensus Penduduk di Tahun 2010, jumlah penduduk tercatat sebanyak 860.209 jiwa. Pada tahun 2013 jumlah penduduk terproyeksi sebanyak 881.686 jiwa yang terdiri dari 416.774 jiwa laki-laki dan 464.912 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduknya sebesar 730 jiwa/km² (Sumber: Lombok Tengah Dalam Angka Tahun 2014)..

Asal Usul Suku Sasak

Guna mengetahui lebih detail mengenai sejarah Kab.Loteng, perlu dijelaskan sepiantas keberadaan dan asal usul penduduk Lombok Tengah dan kapan istilah Lombok Tengah itu muncul. Terkait dengan hal tersebut, perlu ditelusuri asal usul nama suku bangsa Sasak dan nama pulau yang didiaminya, Berdasarkan penemuan arkiologi dijelaskan bahwa:

Kira-kira pada akhir jaman perunggu enam belas abad yang lampau Pulau Lombok bagian Selatan telah dihuni oleh sekelompok manusia yang kebudayaannya sama dengan penduduk di Vietnam Selatan, di Gua Tabon dan Gua Sasak di pulau Pallawa (Filipina Tengah), Gilimanuk (Bali), Malolo (Sumba). Tepatnya pemukiman itu ialah di Gunung Piring, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Menurut Drs M.M Sukarto dan Profesor Solheim guru besar di Universitas Hawaii, kebudayaan mereka yang di Gunung Piring itu termasuk ke dalam *Shan Huyn Kalanny Pottery Tradition*. Juga masih di Lombok Selatan banyak terdapat menhir dan gua bekas pemujaan dan pemukiman

atau pekuburan purba. (Depdikbud, 1988; 11).

Berdasarkan kutipan di atas, suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok berasal dari Vietnam Selatan atau Asia Tenggara. Mereka menyebar ke Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Lombok, Bali dan Flores. Kedatangannya di Pulau Lombok secara bertahap. Suku Bangsa Sasak banyak mendapat pengaruh dari Pulau Jawa. Terlihat dari beberapa unsur kebudayaannya terutama unsur bahasa yang mempunyai banyak kesamaan dengan Suku Jawa dan Suku Sunda. Perbendaharaan kata yang dipergunakan untuk menyebut kebutuhan pokok manusia, seperti: makan, tidur, nama-nama ternak yang dekat dengan kehidupan manusia, adalah sama. Makan dalam bahasa Sasak adalah: “*mangan, medaran, ngajengan, dahar,*” dipergunakan oleh Suku Jawa maupun Suku Sunda. Pemberian nama-nama tempat menunjukkan kesamaan dan adanya benang merah yang menunjukkan hubungan asal usul, seperti: Surabaya, Mataram, Wanasaba (Wonosobo), Kediri, Gersik, Kuripan, Pajang, dan lain-lainnya. Terkait kata “Sasak” dan kata “Lombok” dijumpai dalam buku *Negarakertagama*, (Depdiknas NTB, 1988: 9).

“Dalam lontar itu *Lombok Mirah*” untuk “*Lombok bagian Barat*” dan kata: “*Sasak Adi*” untuk “*Lombok bagian Timur*”. ...Pulau ini dinamakan pulau Sasak, oleh karena pulau ini di zaman dulu ditumbuhi hutan belantara yang sngat rapat, merupakan dinding. Dari kata *Seksek* inilah timbul nama Sasak untuk pulau ini. Dr R. Goris menguraikan

arti kata Sasak secara etimologi; Sasak adalah kata Sansekerta, yang berasal dari kata Sahsaka, Sah = pergi, saka = asal. Jadi orang Sasak adalah orang yang pergi dari negeri asal dengan memakai rakit sebagai kendaraan, pergi dari Jawa dan berkumpul di Lombok. Pendapat Goris ini dapat dibuktikan dengan silsilah para bangsawan, hasil sastra tertulis yang digubah dalam bahasa Jawa Madya dan huruf Jejawan (huruf Sasak)

Kutipan tersebut menunjukkan adanya keterkaitannya antara Lombok dengan Jawa. Nama suku Sasak menurut Teeuw berasal dari kata “*tembasaq*”. Ia menjelaskan; “Sasak berasal dari keadaan penduduk asli pulau ini yang memakai kain *tembasaq* (kain putih). Perulangan dari kata *tembasaq* menjadi *saqsaq*= Sasak. Pendapat lain menyatakan bahwa kata “Sasak’ untuk nama Pulau Lombok ialah nama kerajaan yang pertama-tama ada di Lombok. Kerajaan Sasak itu menurut P. De Roo DeLa Faille berada disebelah Barat Daya dari Pulau Lombok.” (Depdiknas NTB, 1988:10). Kata “*tembasaq*” sebagai asal kata “*sasak*” untuk penamaan suku bangsa kurang dapat diterima. Penulis berpendapat bahwa istilah “*sasak*” itu mendekati kebenaran pendapat dari Dr R. Goris,

Menurut penulis, kata “*Sasak*” dalam bahasa Jawa berarti “rakit” yang terbuat dari bambu untuk “menyeberang”. Sependapat dengan Goris, Lukman tokoh masyarakat Sasak mengatakan bahwa “pada jaman dahulu orang yang pertama datang sebagai penghuni Pulau Lombok, datang dengan menumpang sebuah rakit yang berarti “Sasak’, oleh karena itulah

maka nama penduduknya dinamai orang Sasak. (Lukman: 2005:3). Lebih lanjut Lukman menjelaskan bahwa:

nama Sasak dan Lombok mempunyai kaitan yang erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Ia terjalin menjadi satu, yang berasal dari kata “*Sa’sa’lombo’*” (dari bahasa Sasak) yang berarti sa’=satu, dan *Lombo’*=lurus.

Kata *Lombo’* dalam tulisan lama, juga dalam kamus Dr R Goris, *Beknopt Sasaksch-Nederlandsch Woordenboek*, terdapat kata “*Lombo’*” ditulis dengan tanda hamzah, yang berarti *Rechts*=Lurus. Kata *Lombo’* dalam tulisan lama, ditulis dengan tanda lain, tidak memakai ‘k’ pada huruf akhirnya. Dalam jaman Portugis kata Lombok ditulis dengan memakai huruf “q” pada huruf akhirnya, menjadi “*Lomboq*” dan terakhir sesudah zaman Belanda, ditulis dengan huruf “k” menjadi “*Lombok*”. Cara menyebut dan membacanya, yang sebenarnya tidak berbunyi: o” dalam logat Jawa, tetapi “oo”, yaitu *Sa’sa’lombo’*. Yang kemudian menjadi *Sasak Lombo’*. Yang berarti satunya lurus. ... Memang antara penduduk dan pulau yang didiami tidaklah berpisah. Sebab kedua kata itu mempunyai kaitan, karena kedua kata ini bagi penduduk Lombok mempunyai arti yang luas, bahkan menjadi “falsafah bagi penduduknya “*Sa’sa’Lombo’*” yang berarti secara *letterlijk* “satu-satunya kelurusan”, karena nama ini menjadi sumber hidup dan kehidupan suku yang mendiami pulau ini.” (Lukman; 2009:3).

Sejalan dengan pendapat Lukman, penulis pun berpendapat bahwa: “*Lombok*” berasal dari kata “*Lōmbō’*” (ō dibaca = o dalam kata “*toko*”) yang

berarti “lurus”, Lurus, jujur, mengatakan apa adanya dengan tidak memperdulikan risiko. Hal ini didasarkan pada dugaan bahwa, mereka yang meninggalkan tempat asalnya (dari Kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa), karena tidak betah dengan lingkungannya yang kurang kondusif dan berani mengatakan apa adanya, jujur walaupun pahit. Mereka meninggal tempat asalnya menggunakan “rakit” atau “saksak”. Kelompok tersebut menamakan dirinya orang “Sasak” dan tempat tinggalnya disebut “Pulau Lombok”. Pulau Lombok sebelum abad ke 19 lebih dikenal dengan Pulau Seleparang (*Sela*=batu; *parang*=karang). Penduduk setempat lebih populer menyebutnya “*gumi Sasak*” atau “*gumi Seleparang*”. Nama Lombok lebih dipopulerkan oleh orang luar.

Lintasan Sejarah Pemerintahan di Lombok Tengah

Berbicara mengenai Pemerintahan di Lombok Tengah pada masa lampau berarti berbicara mengenai kerajaan yang pernah eksis dalam lintasan sejarah di wilayah yang sekarang dikenal dengan sebutan Lombok Tengah. Pusat-pusat pemerintahan yang eksis sampai dengan akhir abad ke XVII tepatnya 1695 adalah eksis adalah kerajaan Pejanggik, Kerajaan Langko. Kapan berdirinya belum ada ditemukan sumber tertulis. Di luar Lombok Tengah tepatnya di Lombok Timur, berdiri Kerajaan Seleparang yang merupakan kerajaan terbesar di Pulau Lombok pada masanya dan Kerajaan Pejanggik, Kerajaan Langko berada di bawah higeponinya. Ia telah banyak berhubungan dengan dunia luar, terutama

Majapahit. Kerajaan Seleparang yang menyatu dengan Sumbawa.

Berdasarkan keterangan dalam tesis A.A. Cense dalam ((Rabba, 2002:68).: “*De Kroniek van Banjarmasin*” dan berita dari Makasar tanggal 30 Nopember 1648, seorang putera raja Seleparang Mas Pamayan dilantik menjadi raja Sumbawa. Artinya Seleparang dan Sumbawa merupakan satu kesatuan atau satu kerajaan dan pernah berpusat di Lombok. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kejadian pada 16 Maret 1675. Ketika kompeni diperlakukan tidak wajar di Seleparang, menyebabkan kemarahan VOC dan menyebabkan terjadinya perlawanan oleh Seleparang terhadap VOC. Di bawah pimpinan Kapten Holsteijn VOC menyerang Seleparang dan memaksa Seleparang membayar denda berupa 5.000 - 15.000 pikul kayu sapang kepada VOC. Penyelesaiannya dalam bentuk perjanjian antara Seleparang dengan VOC. Seleparang diwakili oleh tiga orang pejabatnya, yaitu: Raden Abdiwirasantana, Raden Kawisanir Koesing, dan Arya Boesing. Pihak VOC diwakili Jan France Holsteijn, Gerrit Coster dan Coenraat van Breijtenbach. Inti perjanjian tersebut adalah Seleparang membayar 5.000 - 15.000 pikul kayu sapang kepada VOC selama tiga tahun, apabila Seleparang kekurangan, maka tidak perlu dibayar, tetapi dibebankan kepada Raja Sumbawa. Setelah penandatanganan perjanjian Bongaya pada 18 Nopember 1667 antara Goa dengan VOC, Lombok dan Sumbawa lepas dari pengaruh Goa. Gelgel mulai mengincar Seleparang lagi.

Pada tahun 1673 Pusat Kekuasaan Seleparang dipindahkan ke Sumbawa dan pada tahun 1674, Sumbawa menandatangani perjanjian dengan VOC yang isinya melepaskan kekuasaannya di Seleparang. Di Seleparang ditempatkan seorang *Rigent* sebagai pengawas. Hal yang sama dikemukakan oleh Raba, (Rabba, 2002:68). bahwa; “pada 12 Juni 1674, Kompeni memaksa Sumbawa menandatangani perjanjian yang intinya agar melepas haknya atas Seleparang (Lombok)” Pada tahun 1677 dan 1678, Gelgel mengirim ekspedisi kedua kalinya menyerang Seleparang. Serangan tersebut digagalkan oleh Seleparang dengan bantuan Sumbawa dan orang-orang dari Makasar, seperti: Daeng Talolo, Karaeng Jerinika dan Karaeng Pamelikan. Sejak tahun 1668 para bangsawan Makasar menjadikan Lombok dan Sumbawa sebagai pusat perjuangan melawan VOC. Lepasnya pengaruh Sumbawa maupun Gowa terhadap Seleparang menyebabkan kedudukan Seleparang semakin suram dan sirna sekitar tahun 1695 Masehi.

Kerajaan yang pernah ada di wilayah yang dikenal dengan sebutan “Lombok Tengah” sekarang adalah Kerajaan Pejanggik yang berpusat terletak di Kecamatan Praya Tengah sekarang. Data yang lengkap mengenai kapan tepatnya Kerajaan Pejanggik mulai berdiri, belum diketahui. Raja Pejanggik mempergunakan gelar “Pemban” sebagaimana halnya kerajaan Seleparang. Kekuasaan Pejanggik meluas dan mencapai kemajuan pada saat pemerintahan “Pemban Mas Meraja Kusuma”. Zaman keemasan di capai tahun 1675. Sistem pemerintahan diperbaharui dengan menetapkan batas-

batas wilayah kekuasaan. Sebelumnya batas wilayah pada waktu itu didasarkan kepada ikatan kekerabatan. Keberadaan Pejanggik berakhir sekitar tahun 1695 Masehi. Kerajaan lainnya adalah Kerajaan Langko yang berpusat di sebelah Selatan Kota Kopang (12 km, dan termasuk wilayah Kecamatan Janapria sekarang). Van Theeuw (Van Teeuw, halaman.5). menerangkan bahwa “raja-raja Langko merupakan keluarga dari Majapahit (bernama Batara Mumbul). Satu rumpun dengan keluarga Raja-Raja Seleparang”. Kapan berdiri Kerajaan Langko belum dapat diketahui karena kekurangan sumber tertulis. Wilayah pengaruhnya meliputi Janapria, Kopang, Rarang, Tete Batu, Suradadi dengan batas-batas: sebelah Barat sampai Dasan Berahim (Beraim) dan gawah Sukaraja, ke Utara sampai batas wilayah Distrik Kopang, Selatan sampai Dasan Pelambik (Desa Jero Waru Sakra), ke Timur sampai perbatasan Desa Seleparang Runtuhnya Kerajaan Langko bersamaan dengan hancurnya Pejanggik dan Seleparang, karena mendapat serangan dari Kerajaan Karangasem Bali pada tahun 1695.

Sirnanya Kerajaan Seleparang, Kerajaan Langko dan Kerajaan Pejanggik, di wilayah yang disebut Lombok Tengah (sekarang) mulai eksis Kerajaan Memelaq. Kerajaan Mamelaq didirikan oleh Arya Banjar Getas atau Surengrana. Menurut Azhar, kehadiran Arya Banjar Getas dalam pentas pemerintahan di Lombok pada akhir abad ke 17, mengawali kariernya di Seleparang dengan jabatan sebagai seorang prajurit dan menetap di Wanasaba. Pada saat Seleparang di serbu Gelgel tahun 1677 dan 1678; Arya Banjar Getas masih

mempergunakan nama Arya Sudarsana ikut bertempur melawan pasukan Gelgel. Pada saat mempertahankan Seleparang itulah mulai menanjak kariernya di Seleparang. Azhar menjelaskan bahwa: “Lebih-lebih kalau kita kembali ke peperangan antara Kerajaan Seleparang melawan Kerajaan Gelgel untuk kesekian kalinya dalam tahun 1677-1678, justru yang mempertahankan Seleparang adalah para patih Seleparang seperti R Abdi Wirasantana, R Kawisanir Kusing, Arya Busing, Rangga Mumbul dan termasuk Arya Sudarsana”. (Azhar 1997: 23). Sepeninggal patih Perigi, Prabu Kertabumi Raja Seleparang menunjuk Arya Sudarsana atau sebagai pengganti Patih Perigi, yaitu patih Kelima Seleparang yang membawahi Perigi. Informasi dalam Babad Karangasem, yang dijelaskan oleh Agung “keberadaan Arya Banjar Getas itu di Lombok, pada mulanya diketahui ia adalah seorang pembesar (perkanggo) di Kerajaan Seleparang, Kerajaan di Lombok Timur ini terdiri dari 42 Desa... semua penduduk desa-desa ini disebut orang Sasak. (Agung; 1991: 83).

Arya Sudarsana merupakan orang kepercayaan Raja Seleparang, dan Arya Sudarsana orang yang patuh dan tulus kepada Raja, tetapi dengan gencarnya fitnah, kondisi menjadi berubah. Kepatuhannya diwujudkan dalam bentuk memberikan persembahan dengan pakaian serba putih. Disaat duduk di balairung, para keluarga istana termasuk puteri Raja yang berusaha melihatnya dengan menaiki tangga sehingga terjatuh. Peristiwa tersebut menyebabkan raja Seleparang mengusir Arya Sudarsana dan selanjutnya meminta perlindungan ke Pejanggik. Kerajaan

Pejanggik pada saat itu diperintah oleh Pembani Mas Meraja Kusuma. Kerajaan Pejanggik, di bawah pemerintahan Pembani Mas Meraja Kusuma dan Arya Sudarsana (Arya Banjar Getas) diangkat menjadi Panglima Perang dengan gelar “Patingalaga”. Ia menata pemerintahan dengan menetapkan batas-batas wilayah pemerintahan. Atas sarannya dijalankan politik “*Rerepe*”, (*rerepe*’=*perebah*) tanpa pertumpahan darah. Polanya, Raja Pejanggik mengadakan pesta besar-besaran. Disediakan hidangan untuk dicicipi Pembani Pejanggik ala kadarnya, sisanya dikirim kepada Raja-Raja di bawah pengaruhnya. Bagi yang bersedia menerimanya berarti menyatakan takluk kepada Raja Pejanggik, dan yang inilah yang ditundukkan dengan kekerasan. Peran dan posisi sentral Arya Banjar Getas di Pejanggik menyebabkan kecemburuan sosial dari para pembesar (perkanggo) lainnya. Sakit hati para demung akibat dari politik “*Rerepe*” yang dijalankan dan rasa cemburu dari pejabat lainnya membuat situasi tidak kondusif. Prahara di Pejanggik timbul. Hubungan antara Patih dengan Raja terganggu, dalam babad disebutkan penyebabnya adalah karena: perempuan. Raja Pejanggik tertarik terhadap istri Banjar Getas, bernama Lala Junti. Arya Banjar Getas merasa sakit hati dan inilah yang menyebabkan ia memberontak. (Babad Seleparang *Pupuh 400*).

Kekisruhan hubungan antara Raja Pejanggik dan Arya Banjar Getas, dimanfaatkan oleh Karang Asem Bali. Kerajaan Pejanggik, Kerajaan Langko Dan Kerajaan Seleparang ditaklukkan oleh Karang Asem Bali Arya Banjar Getas mendirikan pusat pemerintahan di

“*Memelaq*”, sebelah Utara Kota Praya sekarang. Kata *Mamelaq* berasal dari kata *Meliq*=kharistamik. Pemerintahan mulai ditata sejak Tahun 1696. Disebutkan oleh Van Teeuw bahwa sejak itu Banjar Getas bergeluh Surengrana. Batas kekuasaan Arya Banjar Getas ditentukan adalah Sungai Babak atau sunagi Pandan. Mulai dari Sweta, Penenteng Aik, ke Selatan sampai ke Samudra Hindia. ke Timur sampai ke pantai Timur. Sejak mendirikan pusat pemerintahan di *Mamelaq*, Arya Banjar Getas mempergunakan nama Surengrana. Pusat pemerintahan ditata, mesjid dan pasar dibangun. Ajaran Islam mulai diterapkan secara tegas kepada rakyat. Penduduk dibebaskan dari pajak. Raden Rontron menetap di *Memelaq* dan menggantikan Surengrana. Raden Ronton selanjutnya memindahkan ibukota pemerintahan ke *Gawah Berora* (*Gawah*=Hutan). yang dikenal dengan Praya sekarang. Praya dalam *Kamus Bahasa Jawa Kuno* berarti peninggalan hidup (warisan hidup). Selanjutnya terbentuk kata *Prayatna/Prayata*, yang kurang lebih berarti”orang yang teguh pada pendiriannya dan taat menjalankan keyakinannya.” Di Thailand, dijumpai nama tempat “*Phraya*”, yang merupakan nama sungai di kota Bangkok. Waktu pemindahan pusat pemerintahan diperkirakan terjadi sekitar tahun 1720 dan berakhir sekitar tahun 1842, sebagai akibat Perang Praya I tahun 1941.

Kegagalan ekspedisi Gelgel terhadap Kerajaan Seleparang di Lombok, tidak membuat upaya penguasaan Lombok terhenti. Kerajaan Karangasem Bali yang telah menaklukkan Kerajaan Gelgel di Bali memanfaatkan situasi perpecahan

antara Raja Pejanggik dengan Patihnya (Arya Banjar Getas) seperti diuraikan di atas. Kerajaan Karang Asem mengadakan ekspansi ke Lombok dengan Selanjutnya mendirikan beberapa kerajaan kecil di bagian Barat Pulau Lombok (Sengkongk, Pagutan, Pagesangan, Kediri, Mataram dan Singasari). Kerajaan Mataram berhasil memperluas wilayah kekuasaan dengan menaklukkan satu persatu kerajaan baik yang merupakan kekuasaan orang Sasak maupun orang Bali, yaitu Sakra, tahun 1824-1828, Singasari tahun 1838, Pagutan tahun 1839, Kuripan tahun 1840; Praya tahun 1841 (Perang Praya I).

Kerajaan Mataram Karangasem memindahkan pusat pemerintahannya di Singasari dan diubah namanya menjadi Cakranegara (Kekuasaan Negara sudah bundar). Pada 7 juni 1843 menanda tangani perjanjian dengan Belanda. Isi perjanjian tersebut antara lain:

- 1) Raja Mataram Lombok mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia Belanda. Raja tidak akan menyerahkan atau mengakui kedaulatan bangsa kulit putih lain, selain Belanda.
- 2) Tiga tahun sekali Raja Mataram akan mengirim ke Betawi seorang utusan untuk menghadap Gubernur General, atas biaya pemerintah Belanda.
- 3) Raja Mataram tidak lagi akan menjalankan Hak Tawankarang bila ada perahu atau kapal dapat kecelakaan di perairan di laut.
- 4) Raja Mataram akan melindungi kepentingan perniagaan Belanda.
- 5) Selama Raja Mataram dapat menjalankan isi perjanjian ini dengan baik, Belanda tidak akan campur

urusan pemerintahan di seluruh Seleparang (Lombok). Pengaturan pemerintahan sebagai berikut.

Ke dalam

a) Tingkatan Pemerintahan

Wilayah pemerintahan dibagi dua, yaitu: wilayah Barat Juring (Lombok Barat) dan wilayah Timur Juring (Lombok Timur) dengan batas Kokoh Pandan (Kokoh=Sungai). Di wilayah Timur Juring dibagi dalam beberapa perkanggo dan diserahkan kepada perkanggo-perkanggo Sasak. Perkanggo membawahi beberapa pemekal setingkat Kepala Desa sekarang. Pemekel membawahi beberapa Keliang.

b) Pengangkatan Kepala Pemerintahan. Pemekel dan Keliang ditunjuk oleh perkanggo atas mufakat masyarakat yang dipimpin, diambil dari mereka yang telah secara turun temurun memegang jabatan tersebut baik dari kalangan bangsawan maupun tidak. Persyaratannya dihormati dan disegangi oleh masyarakat. Jika perkanggo meninggal, maka penggantinya ditunjuk oleh Anak Agung atas usul masyarakat.

c) Urusan Desa. Kebijakan Anak Agung disampaikan melalui perkanggo dan diteruskan melalui jenjang yang telah ada. Urusan pembangunan seperti pembuatan saluran irigasi, jalan dilakukan secara mufakat oleh masyarakat dan diteruskan oleh Keliang ke atas, ide timbul dari bawah.

d) Sistem Pemilikan Tanah. Sebelum bercokolnya kekuasaan Bali di

Pulau Lombok, sistem pemilikan tanah dijelaskan oleh Profesor Van Vollenhoven, dalam Alfons sebagai berikut.

Ciri utama dari sistem pemilikan tanah sebelum penaklukan Bali adalah:

- Hak milik bersama tetap sangat kuat atas tanah yang tak diolah di daerah pemilikan (*beschikkingskring*) desa. Ini bebrarti bahwa masyarakat itu sendiri dan para anggota secara perorangan tetapi bukan orang-orang luar mempunyai secara bebas untuk menggunakan tanah yang tak diolah. Masyarakat desa dan para anggotanya mempunyai hak untuk mengolah tanah yang sebelumnya belum diolah, mengumpulkan hasil-hasil hutan, berburu, menggembalakan binatang-binatang ternak dan lain sebagainya.
- Hak pemilikan bersama, tetap membatasi pemilikan tanah bagi petani. Hak atas tanah yang diperoleh petani karena itu dapat diartikan sebagai pemilikan terbatas (*beklemd bezitrecht*).
- Hak milik bersama tidak lagi mengenakan pembatasan-pembatasan yang sungguh-sungguh atas pemilikan tanah bagi golongan aristokrasi.
- Hak atas tanah yang diperoleh golongan aristokrasi itu dengan demikian dapat diartikan sebagai pemilikan tak terbatas (*vrijbezitrecht*). (Alfons van der Kraan: 2009: 10)

Tanah-tanah milik desa atau milik bersama baik yang diolah maupun tidak diolah sepenuhnya di tangan raja. Rakyat yang semula bebas menggarap tanah yang belum diolah, harus mendapat

ijin dari raja. Hutan dan tanah-tanah penggembalaan diubah menjadi “ daerah-daerah perburuan (larangan) untuk keluarga istana dan punggawa-punggawa terkemuka. Berburu di hutan-hutan ini tanpa izin Raja adalah suatu pelanggaran yang dpat dihukum. Bidang-bidang tanah lainnya ditetapkan untuk penggembalaan ternak Raja yang jumlahnya sangat banyak.” (Alfons van der Kraan: 2009: 10). Tanah-tanah yang diolah, terdiri dari tanah jenis, yaitu: tanah “*druwe dalem*” dan tanah “*druwe jabe*”.

- Tanah “*druwe dalem*” merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh Raja secara langsung, dengan kekuasaan di dalam istana.
- Tanah “*Druwe Jabe*”; merupakan tanah-tanah yang tidak dikuasai secara langsung oleh Raja, tetapi dikuasai oleh orang-orang luar Puri (Istana), yaitu orang-orang bangsawan Bali maupun bangsawan Sasak. Mereka bebas dari pajak tanah dan kerja rodi. Setelah tahun 1890 an, banyak terjadi ketidakpuasan akibat beberapa kebijakan raja, antara lain; pengambilan tanah, ladang dan ternak oleh penguasa kerajaan menambah kesengsaraan rakyat. Tanah-tanah yang bagus pengairannya dijadikan taman dan tempat perburuan Anak Agung yang diawasi oleh Lang-Lang Gawah. Dijelaskan oleh Alfons yang dikutip dari J.C. van Eerde, bahwa:

“The last Raja of Lombok, Ratu Agung Ngurah, who roled 1872-92, had at least 32 of these private hunting grounds, all of which were guarded by a special place force (langlang gawah).” (Alfons P. 228).

Keluar

Sejak tahun 1867, Pulau Lombok telah ramai dikunjungi kapal-kapal pedagang dan penangkapan ikan paus dari luar. Pelabuhan antar pulau antara lain: Tanjungkarang, Pedangrea, Teluk Kombal, Labuhan Carik, Sugian, Labuhan Lombok, Labuhan Haji dan Pijot serta Ampenan. Kapal-kapal dari luar negeri terutama dari Eropa, Cina dan Kerajaan-Kerajaan lain di Nusantara. Urusan perdagangan dan luar negeri dipelabuhan ditempat seorang pejabat subandar (sahbandar). Melalui pejabat ini mereka berhubungan dengan kerajaan. Pajak pelabuhan dipungut dengan sistem kontrak, biasanya di pegang oleh Arab, Cina dan Ambon. Mereka diwajibkan menyeter sesuai dengan kontraknya. Penghasilan kerajaan dari pajak ekspor import tahun 1890 mencapai 50.650 *rijksdaalders*. (A.A Ketut Agung h.189).

Inggris menempatkan pedagangnya bernama George Peacock King yang terkenal tangguh. Pedagang Denmark keturunan Scotlandia Mads J. Lange berkongsi dengan John Byrd, pengaruh mereka terhadap Kerajaan Mataram demikian besar. Belanda mulai khawatir terhadap gelagat Inggris dan menugaskan Mayor Altleri Wetters dan Edeling Direktur Toko Konstruksin di Surabaya menyelidki keadaan Bali dan Lombok dengan beslit rahasia tanggal 31 Mei 1838. Hasilnya diketahui bahwa Mataram sedang mengkongsolidasikan diri dibantu oleh G.P King yang berperan menjadi perantaran dalam membina hubungan dengan Inggris di Malaka, menangani urusan pelayanan dan perdagangan dengan luar. Perusahaan King & Co

membuka dok kapal di Labuhan Tereng yang berkembang menjadi Pelabuhan Lembar, menyebabkan Belanda khawatir terhadap Inggris menguasai Lombok.

Pemberontakan terhadap Raja Karang Asem pada tahun 1891 yang meluas menjadi Perang Lombok menyebabkan hancurnya Kerajaan Karangasem Lombok dan penjajahan Belanda secara langsung atas Lombok dimulai. Pemberontakan dipicu oleh perselisihan antara Kelungkung dan Mengwi di Bali dan Anak Agung di Mataram memihak kepada Mengwi dengan mengirim lebih dari 6000 orang Sasak pada 22 Juni 1891 dan diterlantarkan. (A. A. Ketut Agung, h 106). Perlawanan terjadi pada 7 Agustus 1891 (1 Muharam 1310 H) yang dikenal dengan perang Praya II. Perlawanan digerakan oleh Lalu Ismail al. Guru Bangkol dibantu oleh Haji Dolah, Haji Yasin, Mamiq Sopian, Mamiq Diraja, Mamiq Srinata, Mamiq Ocet Talib, Amaq Gowar, Amaq Lembain, Amaq Tombok, dan lain-lainnya (Museum Negeri NTB, h. 19).

Menghadapi pemberontakan tersebut Anak Agung mendatangkan bantuan dari Karangasem Bali pada Mei 1892. Sebanyak 1600 pasukan diperlengkapi senjata dikirim dari Karangasem Bali dengan Kapal Sri Mataram dan Sri Cakra, *creuwnya* di bawah pimpinan Captain **W. Bruce**, dicegat oleh Kapal Belanda **HMSS Java**. Diplomasi dan penyelundupan senjata dari Singapura oleh Anak Agung dibantu oleh seorang Inggris bernama **J.C. Mitchell** dan seorang Rusia bernama **M.P Malygin** yang mendapat konsesi penggalian bahan tambang emas dan sejenisnya dari Raja. Ia ditugaskan

untuk mengadakan pendekatan kepada Inggris guna memengaruhi Belanda agar menghentikan *blokade* di Selat Lombok dan menghentikan penekanan kepada Anak Agung di Lombok.

Kesengsaraan masyarakat, peran Inggris yang besar terhadap Anak Agung mendorong Belanda melakukan campur tangan terhadap pertikaian di Lombok. Alasan lain Belanda campur tangan adalah untuk mencari kekayaan dan memperluas wilayah jajahan secara langsung karena mengetahui kekayaan Pulau Lombok baik hasil-hasil pertanian maupun kandungan bahan tambang (timah). Anak Agung di samping mengadakan hubungan dengan Inggris, juga bersurat kepada Belanda dengan harapan dibantu menumpas pemberontakan yang berkepanjangan. Surat-surat tersebut adalah tanggal 11 Juli, 1 September, 7 September, 1 Nopember, 18 Nopember 1894. Belanda mengirimkan Ekspedisi dengan kapal **HMSS Koningin Emma** dari Batavia pada 30 Juni 1894 dengan maksud awal ingin mendamaikan kedua belah pihak, sekaligus dapat menguasai Lombok secara Langsung. Dalam ekspedisi tersebut di perbantukan 3 buah kapal, yaitu Prins Hendrik, Koningin Emma dan Trom; berikut dua buah kapal lainnya, yaitu Sumatera dan Borneo dengan kekuatan personel 4.373 prajurit dan narapidana. Susunan tim ekspedisi adalah sebagai berikut:

- (1) Panglima perang adalah: Mayor Jendral JA. Vetter.
- (2) Wakil Panglima perang: Mayor Jendral P.P.H. Van Ham.
- (3) Residen Dannenbargh sebagai Penasehat Politik.

(4) Kapten H. Ouispel sebagai Komandan Angkatan Laut.

Tim Ekspedisi tiba di Ampenan pagi hari 5 Juli 1894. Antara 6 Juli 1894 sampai dengan 25 Agustus 1894 terjadi negosiasi antara pihak Anak Agung dengan Belanda. Pada 16 Agustus 1894 Pasukan-pasukan Belanda disebarkan keseluruh Lombok bagian Timur untuk melucuti senjata dan membongkar pertahanan orang Sasak. Di Sukarara pada 17 Agustus 1849 ditempatkan 350 pasukan dan 190 narapidana, di bawah pimpinan Kolonel Van Bijlevelt dan dengan jumlah yang sama di tempatkan di Batukliang di bawah pimpinan Kolonel Lawick Van Bast. Tugas lainnya pasukan di Batukliang adalah menangkap **Daeng Ginaro** yang membantu orang Sasak memerangi AA. Agung, sekaligus mempropaganda melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Di Cakranegara dilakukan pertemuan antara Belanda dengan pihak Kerajaan yang memperbaharui perjanjian tanggal 7 Juni 184, dan pada prinsipnya AA. Ketut selaku putra mahkota menerima persyaratan diajukan oleh Belanda. Inti perundingan tersebut adalah pihak Sasak diatur akan diberikann otonomi dengan pemerintahan sendiri dengan tetap mengaku AA. Ketut yang akan menggantikan AA. Ngurah sebagai raja. Di pihak lain Belanda akan menempatkan pejabat-pejabatnya mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Kejadian selanjutnya setelah pembayaran ongkos perang dan pembahasan konsep pembaharuan perjanjian adalah adanya perasaan kehilangan hak-hak yang dimiliki oleh pihak Kerajaan. Belanda

menghendaki agar orang Sasak mempunyai kebebasan, namun tetap di bawah AA. Agung serta Belanda tidak menghendaki kehancuran kerajaan Bali di Lombok. Pemimpin Sasak telah bersumpah untuk tidak kembali lagi di bawah kekuasaan Bali siapa pun yang jadi Raja. Setiap malam sebelum tanggal 25 Agustus R. Mustaji (Kopang) menjumpai Anak Agung, mengajurkan untuk menggempur Belanda, dengan mengatakan bahwa pemimpin Sasak lainnya masih setia kepada AA. Agung, dan musuh yang harus dihadapi adalah Belanda. Pada siang hari beliau menghadap kepada pejabat Belanda agar bersiap-siap karena akan diserang oleh orang Bali. Pada 25 Agustus 1894 antara pukul 20.30-21.00 terjadi penembakan. Pihak Anak Agung menyatakan penembakan pertama dari arah Bivak Belanda (Bivak yang didirikan di Kompleks Pure Meru Mayura) dan sebaliknya Pihak Belanda menyatakan penembakan pertama dari arah pihak Anak Agung. Tembakan-tembakan awal tersebut adalah strategi R. Mustaji beserta pemimpin Sasak lainnya yang selama perundingan berlangsung berada di Ampenan. Setelah tembak menembak terjadi R. Mustaji segera meninggalkan Ampenan. Wakil Panglima perang Mayor Jendral P.P.H. Van Ham meninggal dunia dalam pertempuran terebut dan Anak Agung Ngurah Karang Asem selaku penguasa terakhir sejak tahun 1870 menyerah pada tgl 20 Nopember 1894.

Di bawah Kekuasaan Belanda

Setelah pembersihan dilaksanakan sampai 1 Desember 1894 oleh Kolonel Swart dan Jendral Segov. K. Swart dan

Panglima Vetter di bantu G. A. Scheeren menyusun pemerintahan di Lombok. Persiapan penyelenggaraan administrasi pemerintahan ditugaskan Dannenbarg (Januari 1895-Juli 1996). Langkah awalnya adalah mengorganisir kekuatan polisi baik di Lombok Bagian Timur maupun Lombok Bagian Barat.

Berdasarkan Stbl. No. 23 Tahun 1882 Bali dan Lombok dalam struktur pemerintahan Belanda sudah merupakan satu karesidenan, namun tidak diperintah secara langsung. Stbl. No. 23 Tahun 1882 disempurnakan dengan Stbl. No. 181/189., tgl. 31 Agustus 1895 dan Lombok ditempatkan di bawah kekuasaan langsung dari pemerintah Belanda. Langkah yang ditempuh sebelum dikeluarkan Stbl. Nomor. 181/1895 adalah mengadakan pendekatan kepada pimpinan-pimpinan Sasak untuk memusyawarahkan batas-batas wilayah kekuasaannya. Pertemuan diadakan pada 27 April 1895. Disepakati nama desa dan batas teritorialnya.

Wilayah Lombok Timur dijadikan *Onder Afdelime Lombok Timur* dibagi menjadi 8 distrik dengan pimpinannya, yaitu:

1. Pringgabaya di bawah Raden Wiranom;
2. Rarang di bawah Raden Satraji;
3. Masbagik di bawah Raden Melayu Kusuma;
4. Praya di bawah Mami Bangkol dan Mami Sopian;
5. Sakra di bawah Mami Kertawan;
6. Batukliang di bawah Mami Ginawang;
7. Kopang di bawah Mamiq Mustiaji;
8. Jonggat di bawah Raden Widana.

Mereka menerima dan setuju batas-batas wilayah dan desa-desa yang menjadi wilayah kekuasaannya. Pada 16 Mei 1895 Dannenbarg membagi administrasi pemerintahan di Lombok Barat dengan dua tipe kedistrikan, yaitu:

- 1) Tipe pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat Sasak meliputi empat kedistrikan.
- 2) Tipe pemerintah masyarakat Bali diperintah oleh punggawa meliputi 12 kepunggawaan yang menguasai wilayahnya juga masyarakat Bali yang berada di seluruh Pulau Lombok berdasarkan hubungan kekerabatannya.

Penataan wilayah pemerintahan diperkuat dengan Stbl. Nomor. 183/1895 tanggal 31 Agustus 1895 dan menetapkan Pulau Lombok dijadikan *Afdeeling* dimasukkan dalam karesidenan Bali dan Lombok. *Afdeeling* Lombok berpusat di Ampenan dibagi menjadi *dua Onderafdeling*, yaitu *Onderafdeling* Lombok Barat dan *Onderafdeling* Lombok Timur berpusat Sisik (Labuan haji). Batas wilayah antara dua *Onderafdeling* tersebut adalah Sungai Babak, mengikuti pembagian pada masa pemerintahan Anak Agung dengan batas wilayah yang sama. *Onderafdeling* Lombok Timur terdiri dari 8 distrik, yaitu Kedistrikan: Jonggat, Kopang, Praya, Batukliang, Rarang, Sakra, Pringgabaya, dan Masbagik. Pimpinan pemerintahan terdiri dari residen sebagai Kepala Karesidenan, Asisten Residen sebagai Kepala *Afdeling*, *Kontroleur* sebagai kepala *Onderafdeling*. Jabatan tersebut dipegang oleh orang Belanda.

Tiap-tiap kedistrikan dipimpin oleh seorang distrik yang berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan dan kepala adat dijabat oleh orang pribumi serta mendapat gaji dari pemerintah. Kepala Desa, Kepala Dusun (Keliang) dengan pembantu-pembantunya tidak menerima gaji tetapi diberikan tanah pecatu yang dipegang secara turun temurun. Kebijakan lainnya yang diambil adalah kebijakan yang dalam pemungutan pajak. Sejak 16 Mei 1895 Dannenbargh mengenakan pajak atas tanah-tanah sawah yang pernah dikuasai oleh Raja, Punggawa, maupun para pemimpin pemerintahan lainnya. Pada 3 Juni 1895 diadakan pemungutan upeti atas sawah dan kebun tadah hujan. Lombok Barat ditetapkan target sebesar fl. 90.123 terkumpul sebesar fl. 87.533 (97%) dan Lombok Timur sebesar fl. 62.045, terkumpul sebesar fl 10.716 atau (17%).

Dalam kondisi ekonomi yang hancur dan prasarana irigasi yang rusak Dannenbargh mempergunakan kekerasan dalam pengumpulan pajak. *“Dannebargh refrained in 1895 from pressing the collection of land tax to the point of using armed force.”* (Alfons p. 109). Petugas keamanan dan kepala distrik di tekan untuk membantu pengumpulan pajak. Di jelaskan bahwa *“determined that the collection rate for east lombokj should this time be higher than a mere 17% the resident issued orders to the dutch officials and district chiefs to use force if need be”.* (p.110). Kebijakan tersebut mendorong rakyat mengadakan perlawanan pada awal pemerintahan Belanda. Perlawanan tersebut adalah: 1) Pemberontakan Mamiq Ocet Talib (Juli s/d September 1896); 2) Pemberontakan di

Tuban Pujut; 3) Pemberontakan di Distrik Praya oleh Lalu Badil. Kebijakan yang diterapkan awal penjajahan Belanda di Lombok, meliputi:

- **Penyelesaian Politis (1896-1897)**

Peyelesaian Politis dilakukan melalui peninjauan kembali pembagian wilayah administrasi pemerintah. Guna mengefektifkan jalannya pemerintahan mengusulkan pemekaran wilayah *Onder Afdeling Lombok Timur* menjadi dua bagian sekaligus sebagai upaya untuk mematahkan berbagai pemberontakan dan gangguan keamanan yang terjadi di Praya dan sekitarnya. Alfons mengutip laporan Liefrinck sbb: *“divided east Lombok into administratitveunits primarily because it facilitated adn thee anti twounitsprimarily becauseit facilitated they anti-insugency operations”* (Lieftricnkn no. 84 p. 112).

Pemekaran Wilayah dilakukan dengan Staatblat No. 248 Tahun 1898 ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Jendral tanggal 27 Agustus 1898 No. 19, yang membagi *Afdeeling* Lombok menjadi tiga *Onderafdeeling*, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Istilah Lombok Tengah mulai saat ini dikenal sebagai terjemahan dari *Onderafdeeling Midden* Lombok. Batas yang disebutkan dalam *Statblat* tersebut adalah Kokoh Dalem sehingga tugu perbatasan Lombok Barat dan Lombok Tengah saat ini dipasang di Kokoh Dalem, yaitu sebelah Timur *Onder Afdeeling* Lombok Barat (Staatblad no. 183/1895 tgl 31 Agustus 1895 disebutkan batasannya Kokoh Babak).

Onderafdeeling Lombok Tengah terdiri dari Distrik-Distrik: Praya, Kopang, Batukliang dan Jonggat. Di samping peninjauan kembali pembagian wilayah pemerintahan, diusulkan pula pemberian Gaji kepada Kepala Distrik. Pada 6 Juli 1897, Resident mengusulkan kepada Gubernur Jenderal agar Kepala Distrik/Punggawa diberikan gaji dan disetujui pada 27 Agustus 1898 dengan subsidi pendanaan dari pusat.

- **Penyelesaian Agraria (1897-1901)**

Penataan di bidang keagrarian melalui: mengimplementasikan proposal dari Vetter dan Scherers, dengan melakukan restorasi kepemilikan tanah-tanah yang dikenal dengan tanah-tanah *druwe jabe* serta menata kembali sistem perpajakan. Tanggal 20 Nopember 1897, Liefrinck menginformasikan kepada para punggawa bahwa ia dapat mengambil kembali tanah-tanahnya yang berada disebelah barat Kokoh Dalem yang menimbulkan berbagai kasus perselisihan terjadi. Penataan keagrariaan juga dilakukan melalui pengaturan kembali sistem perpajakan, mengadakan klasiran dan ukuran tanah yang dipakai secara tradisional semula 1 tanah = 5.832 m² menjadi 7.200 m². Pada 21 juni 1899, memperbaiki sistem perpajakan untuk mengatur tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh raja (*druwe dalem lands*). Ia mengatur kembali masalah tanah pecatu untuk Pekasih, Kepala Desa, Keliang, termasuk tanah-tanah wakaf. Kebijakan lainnya adalah pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah dilaksanakan melalui:

- 1) Peningkatan produktivitas petanian melalui pembangunan berbagai Dam (Bendungan). Dam yang dibangun antara lain: Dam Lendang Ketiri tahun 1922 Dam Gebong tahun 1926 Dam Medas 1935 dan Dam Jurang Sate tahun 1941.
- 2) Pembukaan Lapangan Kerja; pembukaan lapangan kerja dilakukan dengan perbaikan dan pembangunan konstruksi jaringan jalan. Sampai dengan tahun 1911 sepanjang 525 km. Jumlah tenaga kerja dalam periode 1900-1920 kurang lebih 85.780 orang, upah perbulan rata-rata f.19,5 atau rata-rata per hari f.0,33.
- 3) Perbaikan Standar Kesehatan Dan Pendidikan. Berbagai macam penyakit menular berkembang saat itu baik karena kekurangan makanan maupun karena kondisi lingkungan pemukiman yang jelek. Ribuan penduduk meninggal. Tahun 1918 karena *influenza epidemic* tidak kurang dari 36.042 orang meninggal (5,9 %) dari total penduduk diperkirakan sekitar 618.000 jiwa pada tahun 1920 an). Pada tahun 1928 di Mataram dibangun sebuah rumah sakit kecil dengan satu orang dokter. Di Praya dan di Selong dibangun masing-masing sebuah klinik tanpa dokter pada tahun 1931. Satu rumah sakit dan 2 klinik melayani penduduk sebanyak 790.000 jiwa. Dalam bidang pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi, Belanda mulai mendirikan pendidikan dasar dengan tiga tipe, yaitu:
 - a) *The Hollanasch-Indische School*; diperuntukkan bagi

anak-anak bangsa Eropah; anak-anak pejabat orang Bali dan Sasak serta tuan tanah. Bahasa yang dipergunakan bahasa Belanda dengan lama pendidikan 7 tahun. Pertama didirikan tahun 1923.

- b) *The Gouvernment Inlandssche School*. Didirikan tahun 1902. diperuntukkan bagi anak-anak pegawai rendahan, anak-anak kepala desa, tuan tanah, dan lain-lain. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Melayu (bahasa Indonesia) dengan lama pendidikan 5 tahun.
- c) *The Volkscholen (Desa School)*. (tahun 1910), diperuntukkan bagi anak-anak petani dengan lama pendidikan 3 tahun, bahasa pengantarnya adalah bahasa Sasak dan bahasa Bali.

Lembaga-lembaga pemerintahan antara lain:

- 1) Inspektur Polisi (dipegang oleh orang Belanda),
- 2) *Raad Sasak* (peradilan untuk orang-orang Sasak),
- 3) *Raad Kertha* (peradilan untuk orang-orang Bali),
- 4) *Landraad* (peradilan negeri),
- 5) Kepala distrik dibantu oleh seorang *schrijver* (juru tulis), seorang kasir, seorang *selfstandig politie* (semacam Polpapra) dan seorang *Opas* (pesuruh kantor),
- 6) Kepala Desa, Kliang (Kepala Kampung) dibantu oleh Juru Arah untuk menyampaikan perintah-perintah langsung kepada masyarakat,

Lang Lang untuk keamanan. Mereka tidak mendapat gaji, tetapi diberikan tanah pecatu dan dibebaskan dari kerja rodi serta jabatan tersebut turun temurun.

- 7) Pekasih yang mengurus masalah irigasi dan beberapa kelembagaan masyarakat pada masa berkuasanya A.Agung masih diberlakukan.

Berbagai peraturan perundang-undangan dikeluarkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah, antara lain:

- 1) Stbl no. 185 Tahun 1895 tentang peradilan
- 2). Stbl. No. 34 Tahun 1902 tentang Perawat² dan Pembantu-pembantunya;
- 3) Stbl. No. 247 Tahun 1898 tentang Biaya Organisasi Pemerintahan Lombok (Biaya penyelenggaraan antara F 300,-s/d F 650,-);
- 4) Stbl. No. 248 Tahun 1900 tentang biaya (Honor) Distrik;
- 5) Stbl. No. 42 Tahun 1901 tentang Faksinotor untuk Lombok;
- 6) Stbl. No. 90 Tahun 1903 tentang Formasi Polisi untuk Lombok;
- 7) Stbl. No. 45 Tahun 1897 tentang pendirian Bui, Penempatan Sipir dan Kajineman;
- 8) Stbl. No. 289 Tahun 1914 tentang personel BUI Praya, Selong dan Mataram. Pada Tahun 1901, Belanda juga mengeluarkan *Staatblat* mengenai penghapusan perbudakan di Lombok. (Sumber: Ahmad JD)

Di bawah Pendudukan Tentara Jepang

Pendudukan Jepang (1942-1945) dimulai dengan pendaratan di Ampenan tanggal 8 Mei 1942 dan 12 Mei 1942 di Labuan Haji. Nomenklatur dalam struktur pemerintahan pemerintahan diubah, tetapi pembagian wilayah tidak mengalami perubahan.

Pulau Lombok dibagi tiga daerah dan masing masing dikepalai oleh **Bun Ken Kanrikang**, jabatan distrik diganti dengan sebutan **Gunco** dan Kepala Desa menjadi **Sunco**. Sekolah-sekolah semakin diperbanyak dan tidak diadakan pembedaan peruntukan. Sandang, pangan dan perumahan sangat kurang dan menyedihkan.

Kekalahan jepang dan berita Proklamasi 17 Agustus 1945 di Lombok secara resmi mengumumkan penyerahannya pada 27 September 1945 dan Jepang menyerahkan kekuasaannya pada 15 Oktober 1945 di Gedung Mardi Bekso Mataram.

Zaman Kemerdekaan

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan UUD 1945. Pelaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945 dan Aturan Peralihan pasal II UUD 1945 dikeluarkan:

- (1) PP. No. 2/1945, yang menegaskan lagi semua badan dan peraturan perundang-undangan lama masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945.
- (2) PPKI dalam rapatnya pada 19 Agustus 1945 menetapkan bahwa untuk sementara wilayah Indonesia

dibagi menjadi 8 provinsi dan Provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur. Provinsi dibagi lagi menjadi karesidenan-karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen. Salah satunya adalah Provinsi Sunda Kecil (De Kleine Sunda Bilanden). Dengan UU No. 1 Tahun 1945 dibentuk Daerah-Daerah Karesiden Kota berotonomi dan Kabupaten.

- (3) Untuk menjalankan pemerintahan di Tingkat Kabupaten dibentuk Komite Nasional Daerah yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 orang sebagai badan legislatif. Bersama Kepala Daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari. Nusa Tenggara (Sunda Kecil) yang pembentukannya didasarkan pada Stbl. **No. 143 Tahun 1946**, masing-masing pulau (Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Temor beserta kepulauannya dibentuk menjadi Daerah dan struktur pemerintahan dibawahnya disebut Pemerintahan Setempat.

Lombok Tengah merupakan Pemerintahan Setempat sebagai bagian dari Daerah Lombok. Sebelum berlakunya UU NIT No. 44 Tahun 1959. Daerah-daerah tersebut memperoleh penyerahan kekuasaan dari daerah Swapraja (bekas kerajaan-kerajaan dijadikan Daerah Swapraja dan Daerah Lombok yang bukan merupakan Swapraja dibentuk sebagai *Neo Swapraja* berdasarkan *Zelf Bestuurs Regelen* (ZBR tahun 1938) dari bekas-bekas *Onder Afdeeling* sesuai dengan Stbl. No. 23 tahun 1895. Peraturan pembentukan Deaerah Lombok ditetapkan dengan keputusan Presiden Indonesia Timur tgl. 9 Mei 1949 Nomor: 5/Prv/49. Berlakunya UU NIT No.

44/1950, NIT (Stb. No. 44 Tahun 1950) daerah-daerah tersebut dijadikan daerah menurut undang-undang tersebut. Negara Bagian Indonesia Timur dibagi menjadi Daerah besar dan Daerah Kecil yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri dengan tingkatan Daerah Bagian dan Daerah Anak Bagian. Dalam pelaksanaannya dimodifikasi sesuai dengan UU No. 22 tahun 1948. Pada 15 Agustus 1950 diumumkan berlakunya UU No.7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi RIS menjadi UUDS 1950. Pada waktu itu dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan Daerah masih berlaku UU No. 22 Tahun 1948 untuk bekas wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta dan UU Negara Indonesia Timur.

Berubahnya bentuk Negara Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan (NKRI) tahun 1950, Pemerintahan Daerah diatu melalui UU No. 1 Tahun 1957 yang membagi habis wilayah Indonesia dalam bentuk Daerah Swatantra Tingkat I, Tingkat II, Dan Tingkat III. Untuk merealisasi keinginan tersebut dibentuk suatu team yang terdiri dari M. Nasrun SH, Adiwiningun dan Abdurrasyid. Pada Pebruari 1957 tim tersebut mengadakan pengkajian dan hasilnya dituangkan dalam UU No.64 Tahun 1958 dan UU No. 69 Tahun 1958, yang menetapkan pembentukan provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Mendagri tanggal 29 Oktober 1958 No. Up. 5/6/21, diangkat R.A Muhammad Ruslan Tjakraningrat sebagai pejabat sementara kepala Daswati I NTB terhitung mulai tanggal 1 Novemeber 1958.

Pjs. Kepala Daerah Swatantra Tingkat I dibantu oleh Pembantu Kepala Daswati I, dengan SK Mendagri

No. Up.7/14/34 tgl. 29 Oktober 1958 memngangkat H. Akhmad al. Mamiq Ripaah sebagai Pembantu Ps. Kepala Daswati I untuk P Lombok dan M Hasan untuk Pulau Sumbawa. Pada 17 Desember 1958, Ps Kepala Daswati I NTB menyatakan melikwidasi Daerah. Lombok dan Pada 22 Januari 1958 untuk Daerah P Sumbawa. Likwidasi tersebut sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) UU No. 69 Tahun 1958. Selanjutnya tanggal 17 Desember dijadikan sebagai hari lahir Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena pada tersebut tugas-tugas pemerintahan yang ditangani oleh pemerintah Daerah Lombok dan Pemerintah Daerah Sumbawa secara formal beralih ke urusan Pemerintah Daswati I NTB yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Pada awalnya, masing-masing rakyat di Pulau-Pulau Provinsi Sunda kecil mengkhendaki dibentuknya Daswati I dan Pusat Mengharapkan maksimal terbentuk dua Provinsi yaitu, Provinsi NTB (Bali, Lombok dan Sumbawa) dan Provinsi NTT. Realita menunjukkan bahwa Sunda Kecil dibagi menjadi tiga Provinsi. Dalam Kaitannya dengan Daswati II, seluruh urusan yang menjadi urusan Daerah Pulau diserahkan kepada Daswati II. Urusan tersebut diserahkan secara bertahap karena permasalahan teknis.

Lombok Tengah dijadikan sebagai Daerah Swatantra Tk II dengan luas wilayah dan batas-batas yang sama dengan pada waktu luas wilayah dan batas-batas yang sama dengan pada waktu pembentukan *Onderafdeling Miden* Lombok dan digabungkan dalam Daerah Swantatra Tk. I Nusa Tenggara Barat (dibentuk dengan UU No. 64 Tahun 1958

dan UU No. 69 Tahun 1958), yang semula bergabung dengan dari Provinsi Sunda Kecil. Dengan Surat Keputusan Mendagri No. Up.7/14/34 tanggal 29 Oktober 1958 diangkat Lalu Manhep sebagai Ps.Kepala Daswati II Lombok Tengah terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1958.

Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemerintahan daerah dalam perkembangan selanjutnya seperti UU No.18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974 dan terakhir UU No. 32 Tahun 2004 dan UU inipun dipecah menjadi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 22 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2014 menimbulkan berbagai pendapat sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU seperti Perpu No. 1 Tahun 2014 dan Perpu No. 2 Tahun 2014.

Birokrasi di Lombok Tengah Terkini

Birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah mengalami perkembangan sejalan dengan sistem pemerintahan daerah yang ditetapkan secara nasional. Lembaga pemerintahan dibentuk dengan mempertimbangkan urusan wajib yang harus ditangani dan potensi wilayah yang tercermin dalam urusan pilihan. Struktur pemerintahan di bawah Kabupaten seperti Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Pada 2010 diresmikan pemekaran desa sebanyak 15 desa sehingga jumlah

desa/kelurahan pada tahun 2013 menjadi 139 Desa dan 12 Kelurahan, terbagi dalam 1.678 dusun dan 66 lingkungan (peningkatan jumlah dari 1.354 dusun 59 lingkungan keadaan tahun 2010).

Jumlah dan jenis dinas/instansi yang dibentuk tidak terlepas dari kepentingan daerah yang disesuaikan dengan potensi yang ada, pada tahun 2008 kembali mengalami perubahan, yakni mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008. Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 32 buah. SKPD yang dibentuk sejalan dengan urusan yang dijalankan dan potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan. Arahannya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, agar terlepas dari keterbelakangan dan kemiskinan.

SIMPULAN

Pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah merupakan kelanjutan dari pemerintahan lokal, karena konsep Negara Indonesia meliputi wilayah Negara Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara telah berkembang sejak Kerajaan Sriwijaya maupun Kerajaan Majapahit dan mengalami pasang surutnya dengan masuknya dominasi dan penaklukan oleh bangsa dan kelompok lainnya.

Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan serta timbulnya berbagai intrik yang apabila tidak disikapi dengan bijaksana akan membawa kehancuran bersama. Peran birokrasi mempersatukan dan menyejahterakan rakyat sangat menentukan dan harus memerhatikan

rakyatnya. Apabila tidak, maka rakyat akan melakukan perlawanan dan pihak luar akan campur tangan serta mengambil keuntungan dari perlawanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, AA.Gde Putra 2009; *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke colonial*, Cetakan iii, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta,.
- Agung, Anak Agung Ketut, 1991; *Kupu-Kupu Kuning yang Terbang di Selat Lombok*, *Lintasan Sejarah Kerajaan Karangasem, (1661-19500)*; Denpasar; PT Upada Sastraa.
- Azhar, Haji Lalu Muhamad, 2003; *Sejarah Daerah Lombok: Arya Banjar Getas, Bedah Takepan-Babad dan buku Sasak*, PT Intan Sejatri Klaten, Mataram.
- Barbara Kellerman; “ *Bad Leadership-What it is, How it Happens, Why it Matters*”, 2004
- Budiarti, Erni, 2000; *Islam Sasak, Waktu Telu Versus Waktu Lima*; Yogyakarta, LKIS Yogyakarta; bekerja sama dengan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation.
- Cool, Capt.W (*Dutch Engineers 1934; The Dutch in Thee East an Outline of the Military Operations In Lombok 1984*; London, *Translated from the dutch by E.J. Taylor, The Java Head bookshop*,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Nusa Tenggara Barat, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1988; *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, Mataram,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Musium Negeri Privinsi Nusa tenggara Barat 1995/1996; *Pengungkapan Nilai Budaya Naskah Kuno Kotaragama*; Mataram;
- Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Permusiuman, 1990; *Bunga Rampai Kutipan Naskah Lama dan Aspek Pengetahuannya*; Mataram.
- Djelenge,Lalu; 2000; *Keris di Lombok*; Mataram; Yayasan Pusaka Seleparang.
- Efendi, Hasan; 2009; Jatinangor; *Birokrasi Histori dan Kontekstual*, dalam Jurnal “*Manajemen Pemerintahan “Transpormasi Pemerintahan”*”, Vo.1, No. 1.
- Kran, A Van Der; 1980; Lombok: *Conquest, Colonization and Underdevelopment, 1870-1940*; Singapore; Asian Studies Association of Australia.
- Lukman, Haji Lalu; 2005, *Pulau Lombok dalam Sejarah, ditinjau dari Aspek Budaya*.
- Manasse Malo dkk; 1986; *Buku Materi Pokok; Metode Penelitian Sosial*; Jakarta; Penerbit Karunika Universitas Terbuka.
- Parimartha, I Gde; 2002 “ *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915*”; Penerbit Jembatan; Jakarta.
- Raba, Manngaukang dan Asmawati, 2002; *Fakta-Fakta tentang Nusa Tenggara Barat (Lombok &Sumbawa)*, Mataram, UD Bugenvil Ofcet.
- Patilima, Hamid, 2010, *Metode penelitian Kualitatif, edisi revisi*, Bandung,Penerbit Alfabeta,
- Salahuddin, Siti Maryam R; 2001; *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Pulau Sumbawa* (Makalah Non Publikasi),

disampaikan dalam Seminar Rencana Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa pada 13 Januari 2001, di Sumbawa.

Sudirman H, Mamiq Sukme, Bahrie, 2009; *Refrensi Muatan Lokal, Benang-Benang Emas Gumi Sasak*, Praya.

Syamsir, Haji Lalu Moh., Drs H Jalaluddin Arjaki. Agus P.,Lalu; Masykur, Lalu,

Bayan; Lalu Sar'i, 2004; Makalah '*Struktur Budaya Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sasak*.

Zakaria, Fath, 1998; *Mozaik Budaya Orang Mataram*, Pagutan Mataram; penerbit Yayasan Sumusr Mas.